

**KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA  
PADA TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*



**Oleh:**

**JANWAL ALMUTHAZIM**

**1810852018**

**Pembimbing I: Dr. Apriwan, S.Sos, M.A**

**Pembimbing II: Silvi Cory, S.Pd, M.Si**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

## ABSTRAK

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel melalui peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Kebijakan tersebut mendapatkan respon negatif dari ranah domestik maupun internasional karena dinilai dapat merugikan kepentingan Indonesia serta bertentangan dengan aturan perdagangan internasional yang terdapat di *World Trade Organization* (WTO). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalitas dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang telah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai sebuah suatu kebijakan rasional atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut maka digunakanlah teori Model Aktor Rasional dari Graham T. Allison, yang terdiri dari empat tahap yaitu, menentukan tujuan (*goal* dan *objective*), menentukan alternatif pilihan kebijakan, menentukan konsekuensi yang dapat dihasilkan oleh setiap alternatif pilihan kebijakan dan yang terakhir adalah pilihan rasional. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, memanfaatkan data-data sekunder yang ditemukan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan pada tahun 2019, bukanlah sebuah pilihan yang rasional karena jika ditinjau dari aspek politik, lingkungan dan ekonomi kebijakan tersebut banyak menghasilkan kerugian bagi Indonesia daripada keuntungannya. Keuntungan yang didapatkan justru lebih banyak dinikmati oleh perusahaan multinasional (MNC) asal Tiongkok yang telah lama melakukan investasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel, Indonesia, Tiongkok, Model Aktor Rasional, Perusahaan Multinasional



## ABSTRACT

*In 2019, through the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11/2019, the Indonesian government officially issued a policy to ban the export of nickel ore. The policy received negative reactions from both domestic and international actors, as it was considered to be disadvantageous to Indonesia's interests and contrary to international trade rules contained in the World Trade Organization (WTO). The aim of this study is to determine whether the nickel ore export ban policy implemented by the Indonesian government is a rational policy. To find out this, Graham T. Allison's Rational Actor Model theory is used, which consists of four stages, namely, determining goals and objectives, determining alternative policy options, determining the consequences of each policy option and the last is a rational choice. This research is categorized as qualitative research with a descriptive analysis approach, utilizing secondary data. Based on the results of the analysis, it is found that the nickel ore export ban policy issued in 2019 is not a rational choice because when viewed from the political, environmental and economic aspects of the policy it produces more losses for Indonesia than benefits. The benefits gained are more likely to be enjoyed by multinational companies (MNCs) from China that have long invested in Indonesia.*

**Keywords:** *Nickel Ore Export Ban Policy, Indonesia, China, Rational Actor Model, Multinational Corporation*

